

PUDARNYA NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DI ERA GLOBALISASI: TANTANGAN DAN UPAYA PENGUATAN

Ruben Gutama^{1*}, Bambang S. Irianto²

^{1,2}Program Studi teknik industri, Fakultas teknik dan sains, Universitas Pembangunan Nasional
"veteran" Jawa Timur, Surabaya. Indonesia

Email: RubenHutagaol19@gmail.com

ABSTRAK

Globalisasi memperluas pertukaran informasi, budaya, dan teknologi yang membawa manfaat sekaligus tantangan bagi pengamalan nilai-nilai Pancasila. Artikel ini membahas bentuk memudarnya pengamalan Pancasila dalam kehidupan masyarakat, faktor yang memengaruhinya, serta upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat penerapannya. Penulisan menggunakan metode studi pustaka dengan menelaah artikel ilmiah dan sumber relevan mengenai Pancasila, globalisasi, pendidikan nilai, dan karakter generasi muda. Pembahasan menunjukkan bahwa perkembangan teknologi bukan penyebab tunggal lunturnya nilai Pancasila; persoalan juga berkaitan dengan rendahnya pemahaman nilai, lemahnya keteladanan, serta kebiasaan sosial yang kurang mencerminkan toleransi, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Penguatan nilai Pancasila perlu dilakukan melalui pendidikan, keteladanan keluarga dan lingkungan, literasi digital, serta keterlibatan generasi muda dalam kegiatan sosial. Dengan demikian, Pancasila tetap relevan sebagai pedoman dalam menyikapi perubahan global secara kritis dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Pancasila, Globalisasi, Nilai Sosial, Generasi Muda, Pendidikan Karakter.

ABSTRACT

Globalization has expanded the exchange of information, culture, and technology, bringing both opportunities and challenges to the practice of Pancasila values. This article discusses the forms of declining Pancasila practice in social life, the factors that influence it, and possible efforts to strengthen its application. The article uses a literature review by examining relevant scholarly articles and sources on Pancasila, globalization, value education, and youth character. The discussion suggests that technological development is not the sole cause of declining Pancasila values; the issue is also associated with limited understanding of these values, weak role modelling, and social practices that do not adequately reflect tolerance, humanity, unity, deliberation, and justice. Strengthening Pancasila values requires education, positive role models in families and communities, digital literacy,

Article History

Received : Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

and youth participation in social activities. Pancasila therefore remains relevant as a guide for responding to global change critically and responsibly.

Keywords: *Citizenship and Immigration Law, Limited Dual Citizenship, Indonesia, USA.*

PENDAHULUAN

Media sosial kini menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Melalui berbagai platform digital, seseorang dapat memperoleh informasi, membagikan pengalaman, hingga menyampaikan pendapat mengenai persoalan yang sedang ramai diperbincangkan. Salah satu media sosial yang menyediakan ruang tersebut adalah TikTok. Selain menampilkan video dengan berbagai tema, TikTok juga memiliki kolom komentar yang memungkinkan penggunaannya menanggapi suatu informasi secara langsung. Fitur ini membuat komunikasi tidak lagi berlangsung satu arah karena setiap pengguna dapat ikut memberikan pandangan, baik dalam bentuk dukungan, pertanyaan, maupun kritik.

Keberadaan kolom komentar memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembahasan berbagai persoalan publik. Akan tetapi, kemudahan menyampaikan pendapat juga menimbulkan persoalan tersendiri. Tidak semua tanggapan disampaikan dengan cara yang menghargai orang lain. Dalam sebuah perdebatan, misalnya, kritik terhadap suatu kebijakan terkadang bercampur dengan sindiran, tuduhan, atau serangan yang ditujukan kepada pribadi seseorang. Perbedaan pendapat yang seharusnya dapat menjadi bahan diskusi akhirnya berpotensi berubah menjadi pertentangan yang tidak lagi membahas inti permasalahan.

Persoalan tersebut perlu diperhatikan karena kebebasan berpendapat mempunyai hubungan yang erat dengan tanggung jawab dalam berkomunikasi. Setiap orang memiliki kesempatan untuk menyatakan persetujuan maupun ketidaksetujuan terhadap suatu kebijakan. Namun, kebebasan tersebut sebaiknya digunakan dengan tetap mempertimbangkan hak dan martabat orang lain. Papacharissi (2004) menjelaskan bahwa perdebatan yang berlangsung dengan tegas tidak selalu menunjukkan komunikasi yang tidak beradab. Artinya, sebuah kritik tidak dapat dinilai hanya dari keras atau lembutnya bahasa yang digunakan, tetapi juga perlu dilihat dari isi pesan, tujuan penyampaian, dan sikap terhadap pihak yang berbeda pendapat.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia pada tahun 2024 adalah kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di sejumlah perguruan tinggi negeri. Kebijakan tersebut mendapat tanggapan dari mahasiswa dan masyarakat karena berkaitan dengan biaya pendidikan dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Persoalan ini kemudian memperoleh perhatian pemerintah. Pada 27 Mei 2024, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyampaikan keputusan pembatalan kenaikan UKT untuk tahun akademik 2024/2025 setelah mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat dan perguruan tinggi (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2024).

Polemik UKT menjadi konteks yang menarik untuk meneliti cara masyarakat menyampaikan pendapat melalui media sosial. Kebijakan pendidikan bukan hanya berkaitan dengan keputusan pemerintah atau perguruan tinggi, tetapi juga menyangkut kepentingan mahasiswa dan keluarga yang membiayai pendidikan mereka. Karena itu, wajar apabila masyarakat memiliki pandangan yang berbeda mengenai kebijakan tersebut. Hal yang perlu

diperhatikan adalah bagaimana perbedaan pandangan disampaikan dan sejauh mana komunikasi yang berlangsung tetap menghormati pihak lain.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, tetapi juga dapat menjadi dasar dalam membangun hubungan antarmanusia. Regiani dan Dewi (2021) menjelaskan pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, terutama ketika perubahan sosial dan perkembangan teknologi membawa pengaruh terhadap perilaku manusia. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Pancasila tetap relevan untuk dibahas ketika masyarakat menghadapi perubahan cara berinteraksi.

Sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mengandung nilai penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam komunikasi di media sosial, nilai ini dapat diwujudkan melalui sikap menghargai orang lain, menghindari penghinaan, dan tidak memperlakukan seseorang secara tidak adil karena perbedaan pandangan. Seseorang dapat menyampaikan kritik yang keras terhadap suatu kebijakan tanpa harus merendahkan pribadi atau identitas pihak yang dikritik. Dengan demikian, penerapan sila kedua bukan berarti membatasi kritik, melainkan mendorong agar kritik tetap disampaikan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan.

Sementara itu, sila keempat Pancasila menekankan pentingnya kebijaksanaan, musyawarah, dan penghormatan terhadap pendapat. Dalam konteks komunikasi digital, nilai tersebut dapat dikaitkan dengan kesediaan memberikan alasan ketika menyampaikan pandangan, mempertimbangkan pendapat yang berbeda, serta menanggapi persoalan berdasarkan substansinya. Walaupun diskusi dalam kolom komentar TikTok tidak dapat disamakan dengan musyawarah secara formal, prinsip-prinsip yang terkandung dalam sila keempat tetap dapat digunakan untuk menilai kualitas pertukaran pendapat di dalamnya.

Penelitian tentang komunikasi di TikTok sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Murti, Pratama, dan Yulianto (2024), misalnya, mengkaji strategi ketidaksantunan dalam komentar warganet mengenai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kolom komentar TikTok dapat digunakan sebagai sumber data untuk memahami cara masyarakat menyampaikan pandangan politik. Penelitian lain oleh Royani dkk. (2025) membahas dampak penggunaan TikTok terhadap karakter kewarganegaraan siswa, termasuk dampak positif dan negatif yang berkaitan dengan cara penggunaan platform tersebut.

Selain itu, Sholehoddin, Cahyadi, dan Kasanova (2026) telah meneliti bentuk resistensi warganet terhadap kebijakan pendidikan melalui komentar pada akun TikTok KompasTV. Penelitian tersebut menggunakan analisis wacana kritis untuk memahami bagaimana kritik dan penolakan terhadap kebijakan pendidikan disampaikan oleh masyarakat. Berbeda dengan penelitian tersebut, kajian ini diarahkan pada etika penyampaian pendapat dengan menggunakan nilai sila kedua dan keempat Pancasila sebagai dasar analisis, khususnya dalam konteks polemik kenaikan UKT tahun 2024.

Berdasarkan penelitian terdahulu, pembahasan mengenai komunikasi warganet dan penggunaan TikTok telah dilakukan dari berbagai sudut pandang. Namun, masih terdapat ruang untuk mengkaji bagaimana nilai kemanusiaan dan musyawarah dalam Pancasila digunakan sebagai kerangka penilaian etika komunikasi pada satu kasus kebijakan pendidikan yang spesifik. Penelitian ini juga berupaya membedakan antara kritik yang disampaikan secara

argumentatif dan komentar yang menyerang pribadi seseorang. Perbedaan tersebut penting agar penilaian berdasarkan nilai Pancasila tidak menganggap setiap bentuk ketidaksetujuan sebagai perilaku yang tidak beradab.

Atas dasar permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk penyampaian pendapat warganet dalam kolom komentar TikTok tentang kenaikan UKT tahun 2024, serta menganalisis keterkaitannya dengan nilai sila kedua dan keempat Pancasila. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya menerapkan etika dalam komunikasi digital, khususnya ketika masyarakat menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis isi (*content analysis*). Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian berfokus pada isi dan makna komentar yang disampaikan pengguna TikTok, bukan pada pengukuran hubungan antarvariabel secara statistik. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memahami bagaimana warganet menyampaikan pendapat, memberikan tanggapan terhadap pandangan lain, dan menggunakan bahasa ketika membahas suatu kebijakan.

Metode analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi serta mengelompokkan pesan berdasarkan karakteristik tertentu. Hsieh dan Shannon (2005) menjelaskan bahwa analisis isi kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teori atau konsep yang sudah tersedia sebagai dasar pengembangan kategori analisis. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan nilai sila kedua dan keempat Pancasila sebagai kerangka awal untuk memahami etika berpendapat dalam komentar TikTok.

Sumber data utama dalam penelitian ini berupa komentar publik pada unggahan TikTok yang membahas polemik kenaikan UKT tahun 2024. Pemilihan unggahan dilakukan secara purposif, yaitu berdasarkan kesesuaiannya dengan topik penelitian. Unggahan yang dipilih harus secara langsung membahas kebijakan UKT dan memiliki kolom komentar yang masih dapat diakses. Periode unggahan yang direncanakan adalah sekitar Mei hingga Juni 2024, ketika persoalan kenaikan UKT menjadi perhatian masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi nonpartisipan dan dokumentasi digital. Peneliti mengamati unggahan beserta komentar yang tersedia tanpa ikut memberikan tanggapan atau memengaruhi jalannya diskusi. Setiap komentar yang relevan kemudian dicatat dan diberi kode untuk memudahkan proses pengelompokan. Identitas pemilik akun tidak dicantumkan dalam hasil penelitian guna melindungi privasi pengguna.

Sebagai rancangan awal, penelitian menargetkan pengumpulan sekitar 120-180 komentar dari empat hingga enam unggahan yang relevan. Jumlah tersebut dapat berubah sesuai dengan ketersediaan data dan kebutuhan analisis. Komentar yang hanya berisi promosi, pengulangan pesan, atau tidak mempunyai hubungan dengan persoalan UKT tidak dimasukkan ke dalam analisis. Peneliti juga memperhatikan variasi tanggapan agar data tidak hanya berasal dari komentar yang mendukung atau menolak kebijakan.

Tahap analisis dimulai dengan membaca seluruh komentar terpilih untuk memahami isi pesan dan konteks pembahasannya. Selanjutnya, komentar dikelompokkan berdasarkan bentuk penyampaian pendapat, seperti kritik yang disertai alasan, tanggapan yang menghargai perbedaan pandangan, sindiran, dan komentar yang mengandung serangan personal.

Pengelompokan tersebut kemudian dianalisis menggunakan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta prinsip kebijaksanaan dalam menyampaikan pendapat.

Untuk menjaga ketepatan penafsiran, setiap komentar dianalisis berdasarkan konteksnya. Peneliti tidak langsung menganggap komentar yang bernada keras sebagai bentuk pelanggaran etika. Kritik terhadap kebijakan tetap dibedakan dari penghinaan terhadap individu. Selain itu, hasil pengelompokan diperiksa kembali untuk memastikan bahwa penafsiran yang dilakukan memiliki dasar yang jelas dan tidak hanya mengikuti pandangan pribadi peneliti.

HASIL PEMBAHASAN

Bentuk Tantangan Pengamalan Pancasila

Penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai bentuk penyampaian pendapat pengguna TikTok terhadap kebijakan kenaikan UKT tahun 2024. Komentar yang dikumpulkan akan dikelompokkan berdasarkan isi tanggapan serta cara pengguna menyampaikan persetujuan maupun ketidaksetujuan. Pengelompokan dilakukan dengan memperhatikan argumentasi yang digunakan, sikap terhadap pihak lain, dan keterkaitannya dengan nilai sila kedua serta keempat Pancasila.

Secara umum, analisis akan difokuskan pada tiga aspek, yaitu bentuk kritik terhadap kebijakan, sikap dalam menghadapi perbedaan pendapat, serta penggunaan bahasa yang berkaitan dengan penghormatan terhadap martabat manusia. Ketiga aspek tersebut digunakan untuk mengetahui apakah suatu komentar membahas persoalan secara substantif atau justru mengalihkan perhatian kepada serangan terhadap individu.

Tabel 1. Kategori Analisis Komentar TikTok

No.	Kategori	Indikator yang diamati
1	Kritik argumentatif	Menyampaikan persetujuan atau penolakan disertai alasan yang relevan
2	Penghormatan terhadap pendapat lain	Menanggapi pandangan berbeda tanpa merendahkan pihak lain
3	Kritik konstruktif	Menyampaikan masalah disertai pertimbangan atau usulan penyelesaian
4	Serangan personal	Mengalihkan kritik dari persoalan kepada penghinaan terhadap individu
5	Komentar diskriminatif	Merendahkan seseorang berdasarkan identitas atau latar belakang tertentu
6	Komentar ambigu	Makna atau konteks tidak cukup jelas untuk dikategorikan

Sumber: Kerangka analisis penelitian yang disusun berdasarkan nilai sila kedua dan keempat Pancasila.

Setelah data terkumpul, hasil penelitian perlu menjelaskan jumlah komentar yang dianalisis, variasi pendapat yang ditemukan, serta contoh komentar yang telah dianonimkan. Uraian hasil sebaiknya menunjukkan hubungan antara kategori analisis dan bukti komentar, sehingga kesimpulan tidak hanya didasarkan pada penilaian peneliti.

Pembahasan

1. Media Sosial sebagai Ruang Penyampaian Pendapat Masyarakat

Kehadiran media sosial memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembahasan isu publik. Melalui kolom komentar TikTok, seseorang dapat memberikan tanggapan tanpa harus berada di tempat yang sama dengan pengguna lainnya. Kondisi ini memungkinkan sebuah kebijakan memperoleh beragam respons dari kelompok masyarakat dengan pengalaman dan kepentingan yang berbeda.

Dalam persoalan kenaikan UKT, keberadaan ruang diskusi digital menjadi relevan karena kebijakan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pendidikan. Mahasiswa, orang tua, dan masyarakat umum dapat memiliki pertimbangan yang tidak selalu sama mengenai besaran biaya kuliah maupun tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan. Perbedaan tersebut merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokratis.

Walaupun demikian, kemudahan untuk berkomentar tidak selalu membuat sebuah diskusi berlangsung dengan baik. Sebuah pesan dapat memperoleh tanggapan yang sangat cepat, sementara informasi yang menjadi dasar pendapat belum tentu dipahami secara menyeluruh. Di sisi lain, pernyataan yang disampaikan melalui teks juga dapat menimbulkan perbedaan penafsiran karena pembaca tidak selalu mengetahui maksud dan konteks pembicara.

Murti dkk. (2024) memperlihatkan bahwa komunikasi politik pada TikTok dapat memuat berbagai bentuk ketidaksantunan. Temuan penelitian tersebut menunjukkan pentingnya memperhatikan cara warganet menyampaikan tanggapan, terutama ketika pembahasan berkaitan dengan isu yang memunculkan perbedaan pandangan. Hal tersebut menjadi salah satu dasar untuk menempatkan etika komunikasi sebagai bagian penting dalam penelitian ini.

Namun, komunikasi yang beretika tidak berarti mengharuskan setiap orang menyetujui suatu kebijakan. Kritik tetap merupakan bagian dari penyampaian aspirasi masyarakat. Persoalan etika justru muncul ketika cara menyampaikan kritik mengabaikan penghormatan terhadap orang lain atau ketika suatu perdebatan tidak lagi berhubungan dengan masalah yang sedang dibicarakan.

2. Nilai Kemanusiaan dalam Etika Berkomentar di TikTok

Sila kedua Pancasila mengajarkan pentingnya memperlakukan manusia secara adil dan beradab. Nilai ini tidak hanya berlaku ketika seseorang berinteraksi secara langsung, tetapi juga dapat diterapkan dalam komunikasi melalui media digital. Meskipun komunikasi dilakukan melalui layar, pihak yang menerima atau menjadi sasaran komentar tetap merupakan individu yang memiliki martabat dan hak untuk dihormati.

Dalam perdebatan mengenai kebijakan publik, salah satu bentuk penerapan nilai kemanusiaan adalah menyampaikan kritik dengan berfokus pada kebijakan atau tindakan yang dipersoalkan. Sebagai contoh, seseorang dapat mempertanyakan dasar penetapan UKT, kemampuan ekonomi mahasiswa, atau alasan perubahan biaya pendidikan. Kritik semacam ini tetap dapat disampaikan secara tegas karena yang menjadi perhatian adalah persoalan yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Berbeda halnya apabila tanggapan berubah menjadi penghinaan yang ditujukan kepada pribadi seseorang. Komentar yang menyerang penampilan, latar belakang keluarga, atau identitas tertentu tidak memberikan penjelasan yang berarti terhadap masalah UKT. Pernyataan tersebut justru berpotensi merendahkan martabat pihak lain dan memperburuk kualitas diskusi.

Nilai kemanusiaan dalam Pancasila dapat menjadi pengingat bahwa kebebasan menyampaikan pendapat seharusnya tidak digunakan sebagai alasan untuk memperlakukan orang lain secara tidak adil. Menghargai martabat manusia juga tidak berarti bahwa pejabat publik maupun lembaga pendidikan harus terbebas dari kritik. Tanggung jawab terhadap kebijakan tetap dapat dipertanyakan melalui alasan yang jelas dan relevan.

Dengan demikian, penerapan sila kedua dalam komunikasi TikTok tidak cukup dinilai dari penggunaan kata-kata yang terdengar sopan. Isi komentar juga harus diperhatikan. Pernyataan yang disampaikan dengan bahasa halus belum tentu menghormati orang lain apabila mengandung diskriminasi, sedangkan kritik yang tajam dapat tetap menghargai nilai kemanusiaan apabila tidak menyerang martabat individu.

3. Relevansi Sila Keempat Pancasila terhadap Perbedaan Pendapat

Selain nilai kemanusiaan, sila keempat Pancasila juga memiliki hubungan dengan cara masyarakat menyampaikan pendapat. Sila ini menekankan pentingnya kebijaksanaan dan musyawarah dalam kehidupan bersama. Salah satu unsur yang dapat diterapkan dalam komunikasi sehari-hari adalah kesediaan untuk mendengarkan pendapat orang lain dan mempertimbangkan alasan sebelum mengambil sikap.

Dalam pembahasan kebijakan UKT, seseorang mungkin menolak kenaikan biaya pendidikan karena menilai kebijakan tersebut dapat memberatkan mahasiswa. Sementara itu, pihak lain mungkin memberikan pandangan mengenai kebutuhan pembiayaan perguruan tinggi. Perbedaan tersebut tidak harus selalu menghasilkan pertentangan pribadi. Masing-masing pihak dapat menyampaikan alasan dan menanggapi argumen yang dikemukakan pihak lain.

Papacharissi (2004) menekankan pentingnya membedakan kesantunan dengan kualitas komunikasi demokratis. Pandangan ini relevan dengan sila keempat Pancasila karena musyawarah tidak selalu berarti tidak adanya perbedaan pendapat. Justru melalui perbedaan tersebut, masyarakat dapat mempertimbangkan berbagai alasan sebelum membentuk suatu pandangan.

Walaupun demikian, kolom komentar TikTok tidak dapat langsung dianggap sebagai kegiatan musyawarah yang sesungguhnya. Pengguna biasanya menyampaikan pendapat secara singkat dan tidak selalu terlibat dalam pertukaran argumen yang berkelanjutan. Oleh karena itu, nilai sila keempat lebih tepat digunakan untuk melihat unsur-unsur kebijaksanaan dalam komunikasi, seperti adanya alasan yang relevan, kesediaan merespons pendapat berbeda, dan upaya menghindari serangan pribadi.

Dalam kaitannya dengan persoalan UKT, penerapan nilai sila keempat dapat dilihat dari bagaimana seseorang membahas masalah secara terbuka dan memberikan ruang bagi pandangan yang berbeda. Kritik yang disampaikan melalui penjelasan dan pertimbangan yang masuk akal berpotensi memberikan kontribusi lebih besar terhadap diskusi dibandingkan komentar yang hanya bertujuan merendahkan pihak tertentu.

4. Pentingnya Penerapan Nilai Pancasila dalam Komunikasi Digital

Pancasila sering kali dipahami sebagai materi yang dipelajari di sekolah maupun perguruan tinggi. Padahal, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya memiliki hubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari, termasuk aktivitas menggunakan media sosial. Cara seseorang menanggapi informasi, memperlakukan orang lain, dan menghadapi perbedaan pandangan merupakan contoh tindakan yang dapat dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila.

Regiani dan Dewi (2021) menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila perlu terus diterapkan dalam kehidupan masyarakat agar tidak berhenti sebagai pemahaman yang bersifat teoritis. Dalam konteks perkembangan teknologi, penerapan tersebut dapat dilakukan melalui sikap yang lebih bertanggung jawab ketika berinteraksi di ruang digital.

Hasil penelitian Royani dkk. (2025) juga menunjukkan bahwa penggunaan TikTok mempunyai keterkaitan dengan karakter kewarganegaraan siswa, baik dalam bentuk dampak positif maupun negatif. Hal ini menjadi pengingat bahwa media sosial bukan hanya tempat mengakses hiburan, tetapi juga ruang yang dapat memengaruhi pengalaman sosial dan cara individu berhubungan dengan orang lain.

Pendidikan Pancasila memiliki peran untuk membantu masyarakat memahami bahwa kemampuan berkomunikasi di media sosial tidak cukup hanya mengandalkan keterampilan menggunakan teknologi. Pengguna juga perlu memiliki kesadaran untuk memeriksa informasi, menghargai perbedaan pendapat, dan mempertimbangkan dampak dari pernyataan yang disampaikan.

Di sisi lain, pendidikan etika digital tidak seharusnya digunakan untuk membungkam kritik masyarakat. Nilai Pancasila justru dapat menjadi dasar agar masyarakat mampu menyampaikan pendapat secara bebas sekaligus bertanggung jawab. Dalam hal ini, nilai kemanusiaan dan musyawarah dapat berjalan bersama: masyarakat memiliki ruang untuk mempertanyakan kebijakan, sementara martabat setiap pihak tetap dihormati.

Melalui pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa Pancasila masih memiliki relevansi dalam menghadapi perubahan pola komunikasi masyarakat. Tantangan yang dihadapi bukan hanya bagaimana masyarakat mengenal nilai-nilai Pancasila, tetapi juga bagaimana nilai tersebut dijadikan pertimbangan ketika menyampaikan pendapat di ruang digital.

KESIMPULAN

Perkembangan media sosial telah memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat mengenai berbagai persoalan publik. Dalam konteks polemik kenaikan UKT tahun 2024, kolom komentar TikTok dapat menjadi objek penelitian untuk memahami cara masyarakat menyampaikan kritik, dukungan, dan tanggapan terhadap kebijakan pendidikan.

Nilai sila kedua dan keempat Pancasila dapat digunakan sebagai dasar untuk mengkaji etika berpendapat di ruang digital. Sila kedua menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, sedangkan sila keempat memberikan landasan mengenai pentingnya kebijaksanaan, argumentasi, dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat. Kedua nilai tersebut tidak mengharuskan masyarakat untuk selalu memiliki pandangan yang sama, tetapi dapat menjadi pedoman agar perbedaan pendapat tidak berubah menjadi serangan terhadap pribadi seseorang.

Penerapan nilai Pancasila dalam komunikasi digital juga memerlukan kesadaran bahwa kebebasan berpendapat dan tanggung jawab sosial perlu berjalan bersama. Kritik terhadap kebijakan publik merupakan bagian penting dari kehidupan demokratis, tetapi penyampaian tetap perlu memperhatikan isi, konteks, dan dampaknya terhadap orang lain.

Kesimpulan akhir penelitian harus dilengkapi dengan pola komunikasi yang benar-benar ditemukan dalam sampel komentar TikTok, termasuk variasi komentar yang sesuai, tidak sesuai, atau tidak dapat dikategorikan secara pasti berdasarkan indikator penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Hsieh, H.-F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. *Qualitative Health Research*, 15(9), 1277-1288. <https://doi.org/10.1177/1049732305276687>
- Murti, R. W., Pratama, H., & Yulianto, H. J. (2024). Impoliteness strategies in online political discourse: A case study of Indonesian netizens' comments on TikTok. *English Education Journal*, 14(3), 428-439. <https://doi.org/10.15294/cxj95428>
- Papacharissi, Z. (2004). Democracy online: Civility, politeness, and the democratic potential of online political discussion groups. *New Media & Society*, 6(2), 259-283. <https://doi.org/10.1177/1461444804041444>
- Regiani, E., & Dewi, D. A. (2021). Pudarnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat di era globalisasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 30-38. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1402>
- Royani, N., Ismail, M., Sawaludin, S., & Alqadri, B. (2025). Dampak penggunaan media sosial Tik Tok terhadap civic disposition siswa di Madrasah Aliyah Al-Istiqomah NW Dasan Poto. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 10(2), 126-137. <https://doi.org/10.24269/jpk.v10i2.12065>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2024, 27 Mei). *Mendikbudristek batalkan kenaikan UKT*. <https://setkab.go.id/mendikbudristek-batalkan-kenaikan-ukt/>
- Sholehoddin, A., Cahyadi, D., & Kasanova, R. (2026). Wacana resistensi netizen terhadap kebijakan pendidikan dalam kolom komentar TikTok KompasTV: Analisis wacana kritis Norman Fairclough. *Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology*, 4(2), 3314-3320. <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.11069>